

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan peraturan. Perubahan tersebut untuk mendukung suatu Pemerintah Daerah agar dapat mewujudkan *good governance*. Keberhasilan dalam suatu pembangunan daerah tidak lepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang baik, salah satunya pemanfaatan teknologi informasi. Dimana dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat serta pemanfaatannya yang cukup luas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan yang berkualitas juga tidak dapat dipisahkan oleh faktor kompetensi sumber daya manusia. Faktor kompetensi sumber daya manusia sangat penting karena apabila sumber daya manusianya tidak berkompetensi maka tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga dapat menyebabkan pemborosan berupa waktu dan tenaga sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak tepat waktu.

Fenomena laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan hal yang sering di perbincangkan, dimana masih banyak laporan keuangan pemerintah yang masih belum menyajikan data yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan dimana masih banyak permasalahan yang dicatat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan

(BPK) (Melati Ramadhni, et al., 2018). Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, laporan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

SKPD sudah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang bisa diakses, dikelola serta didayagunakan oleh bermacam pihak serta masyarakat luas. Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Erlina, et al., 2015). Peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sesuai PSAP No. 1 Paragraf 14, Laporan keuangan terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu : laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan

operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (Erlina, et al., 2015).

Menurut Bapak Anjas Pramana S.Ak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , Pemerintah Kota Medan ternyata pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah sudah cukup baik dioperasikan dan sudah terpenuhi fasilitas pendukung teknologi informasinya seperti fasilitas komputer, fasilitas jaringan internet serta pemeliharaan dan perbaikan komputer untuk proses akuntansi sampai pembuatan laporan keuangan. Untuk sekarang sering terjadinya pergantian aplikasi sistem informasi akuntansi dari kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan. Salah satunya aplikasi SIMDA ke SIPD.

Kompetensi sumber daya manusia yang terjadi di pemerintah Kota Medan, kurang memadai pelatihan terkait sistem keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi yang terjadi di pemerintah Kota Medan, sekarang ini adanya implementasi pembangunan WBK dan WBBM. Hal ini untuk pencegahan korupsi, kolusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kerja dan mengadakan penyuluhan tentang gratifikasi dan penanggulangan korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Menurut penelitian (Nur, 2019) dengan judul Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bahwa fenomena kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini saya mengambil variabel (X2) yaitu sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, karena kualitas laporan keuangan yang relevan disebabkan pada sumber daya manusia itu sendiri.

Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi. Saat ini, sektor publik berfokus pada penguatan persyaratan akuntabilitas dan transparansi publik, baik pusat maupun daerah (Gunadi, 2017, p. 5). Organisasi sektor publik yang berperan membagikan pelayanan kepada warga juga wajib dapat sediakan sistem data yang bertabiat interaktif serta berorientasi pada kebutuhan warga (Gunadi, 2017, p. 4). Tujuan dari pelaporan sektor publik adalah sediakan data mengenai sumber daya, alokasi, serta pemakaian sumber daya keuangan, sediakan data mengenai gimana entitas mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya, sediakan data yang berguna buat mengevaluasi keahlian entitas dalam membiayai aktivitasnya dan penuhi kewajiban dan komitmennya, sediakan data mengenai kondisi keuangan suatu entitas serta pergantian yang berlangsung, serta sediakan data secara totalitas yang bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efesiensi, serta pencapaian tujuan (Bastian, 2009).

Pemanfaatan teknologi informasi ialah salah satu aspek buat mewujudkan laporan keuangan yang mempunyai ketepatan waktu dalam penyajiannya dan informasi didalamnya bisa diandalkan (Nur, 2019). Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah diatur dalam PP No. 65 Tahun 2010 yang menerangkan terpaat sistem informasi keuangan daerah. Peraturan tersebut mengendalikan batasan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan terpaat dana perimbangan yang tertunda apabila terlambat dalam melaksanakan penyampaian. Dengan dikeluarkannya PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik (Sriwijayanti, 2018). *Good governance* itu sendiri suatu pengelolaan keuangan publik dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan pengguna sistem informasi keuangan yang diharapkan dapat mendorong pengelolaan keuangan yang bersifat transparansi dan efisiensi (Jauhari, et al., 2019). Pemerintah daerah sebagai pengguna laporan keuangan membutuhkan nilai dan informasi yang tepat waktu untuk memfasilitasi dan memungkinkan mereka melakukan analisis dan membuat keputusan yang tepat (Rahmayuni & Pinem, 2020).

Dengan kemajuan teknologi informasi yang tumbuh pesat serta kemampuan pemanfaatannya secara luas, pemerintah pusat serta pemerintah daerah berkewajiban buat meningkatkan serta menggunakan kemajuan teknologi informasi buat tingkatkan keahlian mengelola keuangan wilayah dan menyalurkan data keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dalam sistem akuntansi pemerintah, ada beberapa fitur atau persyaratan penting yang diperlukan antara lain yaitu sistem akuntansi pemerintahan harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit (Maghfirah, et al., 2020). Teknologi informasi pula bisa membuka kesempatan untuk bermacam pihak buat mengakses, mengelola serta mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat (Hanif , 2017). Hal ini di dukung dari penelitian (Nur, 2019) yang menyimpulkan bahwa Pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.. Namun berbanding terbalik dengan penelitian (Devi, 2018) yang menyimpulkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan selanjutnya adalah kompetensi sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dilakukan dalam oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (Stefani Marina Palimbong, et al., 2018). Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia dalam

suatu organisasi atau instansi pemerintah, maka sumber daya manusia suatu organisasi atau instansi pemerintah sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri. Artinya, keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan, karena kapasitas talenta suatu organisasi atau lembaga sangat tinggi, maka menentukan kualitas talenta yang dipertahankan secara alami dan pada akhirnya menentukan kualitas daya saing lembaga itu sendiri (Armel, 2017). Lingkungan kerja yang baik bisa meningkatkan motivasi sumber daya manusia yang bertugas, tanpa adanya dukungan kompetensi sumber daya manusia yang baik kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan (Satrio, et al., 2016). Kompetensi adalah karakteristik seseorang yang dapat dipertimbangkan dari sisi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan apa yang dimiliki untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya (Alvi Syahri Ramdhan Nasution, et al., 2019). Kompetensi juga didefinisikan sebagai keterampilan yang dimiliki untuk menghadapi tantangan dalam pekerjaan (Jaradat, et al., 2017). Oleh karena itu dibutuhkan SDM yang berkompeten untuk menghadapi tantangan yang dihadapi saat menyusun laporan keuangan. Kompetensi sendiri bergantung pada tingkat pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Satrio, et al., 2016). Organisasi butuh mempraktikkan sumber daya manusia berbasis kompetensi buat meminimalisir terbentuknya kasus antara kantor dengan pegawai (Aryanti, 2018). Pegawai merupakan manusia yang mempunyai kebutuhan, harapan yang butuh didengar bersamaan dengan kemampuan serta kompetensi yang bisa dibesarkan buat mencapai prestasi kinerja organisasi. Dalam kasus laporan keuangan jika sumber daya manusia mempunyai kompetensi yang besar hendak menghasilkan kinerja yang bermutu (Aryanti, 2018). Selain itu, untuk

menunjukkan manajemen yang sukses sumber daya yang dikelolanya, dan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya (Indah & Setiyawati, 2019). Hal ini di dukung dari penelitian (Nur, 2019) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun berbanding terbalik dengan penelitian (Hadiyati Y, et al., 2019) yang menyimpulkan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah komitmen organisasi, karena terkait dengan keandalan laporan keuangan itu sendiri. Sebab laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika informasi laporan keuangan bebas dari kesalahan dan harus dibuat secara jujur agar apa yang disajikan sesuai dengan yang diharapkan hal ini sesuai dengan tujuan komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu kondisi dimana seseorang karyawan memihak pada organisasi tertentu dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi (Ikhsan, 2018). Konsep komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut (Wibowo, 2017). Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi pada suatu organisasi akan lebih stabil dan produktif, dan pada akhirnya organisasi akan lebih menguntungkan (Robbins & Stephen P, 2003). Dengan faktor yang sudah dijabarkan pada paragraf sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap

kualitas laporan keuangan. Hal ini di dukung dari penelitian (Ikhsan, 2018) yang menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian (Fitri Mariana Tampubolon & Ahmad Basid, 2019) yang menyimpulkan bahwa berdasarkan uji regresi linier berganda dan uji t menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Ketidak konsistenan riset-riset terdahulu mulai dari hasil pemeriksaan BPK-RI atau LKPD mendorong penulis untuk meneliti kembali Pengaruh Sistem Informasi Pengembangan Daerah (SIPD), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Instansi Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat di identifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perubahan terhadap peraturan Pemerintah Daerah mengenai aplikasi Pemerintah Daerah dimana sering terjadinya pergantian aplikasi sistem informasi akuntansi.
2. Sering terjadinya pergantian pimpinan SKPD atau kuasa anggaran serta kurang memadai pelatihan terkait sistem keuangan pemerintah daerah. Alokasi penempatan pegawai yang berlatar belakang pendidikan tamatan SMA yang kurang baik untuk perkembangan saat ini.
3. Adanya implementasi pembangunan WBK dan WBBM.

1.3 Batasan Masalah

Tujuan pembatasan permasalahan ini merupakan supaya ruang riset peneliti tidak menyimpang dari topik yang dibahas dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Maka peneliti membatasi penelitian ini pada Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan ?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan ?

3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan ?
4. Apakah Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Apakah Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bagi penulis dapat menambah wawasan serta lebih mendalami dan memahami lagi mengenai Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kota Medan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan acuan bagi pihak lain yang ingin mengembangkan penelitian selanjutnya.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah terkhusus dalam bidang Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.